

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib Muhammad, 2012, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Alkotsar Artidjo (Editor), 1997, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional*, FH UII, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly & Safa'at Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen & Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Atmosudirjo Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1996.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fendri Azmi, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batubara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State)*, Nusa Media, Bandung.
- Handoko Hani, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rafika Aditam.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidjaz Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- HR Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, cetakan pertama.
- Huda Nurul, 2015, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Gramedia, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta.
- Jeddawi Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Total Media, Bukaka.
- Kelsen Hans, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State)*, Nusa Media, Bandung.
- Koencoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kotijah Siti, 2018, *Bunga Rampai Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Timur*, Pustaka Abadi, Kalimantan Timur.
- Kusumaatmadja Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung.



- Lauer Robert H., 2003, *Prespektif tentang Perubahan Sosial*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Hadjon Philipus, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Manan Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Martono Nanag, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Ke- I, Rajawali Pers, Depok.
- MD Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media..
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan kedua, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muchtar Masrudi & Rekan, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nanag martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurcholis Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Nurul Huda & Rekan, 2015, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Gramedia, Jakarta.
- Prasetya Irawan, 2000, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta.
- Raharjo Mursid, 2014, *Memahami Amdal*, Graha Ilmu, Semarang.
- Raisul Muftaqien, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Revrison & Baswir, 2000, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo.
- Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Sidharta Arief, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirajun dan Rekan, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.
- Soejito Rawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.



- Spelt N.M dan Berge J.B.J.M. ten, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Ke- I, Rajawali Pers, Depok.
- Taufani, Suteki & Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Ke- I, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Thalib Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Yahya Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006,
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-I, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Tesis**

- Johan, “Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2022.

### **Disertasi**

- Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggung Jawaban Kekuasaan, Disertasi*, Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya, Tahun 1990.

### **Jurnal**

- Abrori, “Keabsahan Penggunaan Kewenangan Kebebasan Bertindak Bagi Pemerintah (Diskresi): Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol. I, No. 1, Mei 2016.
- Adharani Yulinda & Nurzaman R. Adi, “Ungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Bina Hukum Ligkungan*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.
- Agus Muhammad, “Penanggulungan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum *Progresif*”, *Jurnal MMH*, Volume 41, Nomor 4, Oktober 2012.
- Akmal Zainul, “Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.
- Al Amri Fauzi Hadi, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Bina Hukum Ligkungan*, Vol. 6, No. 3, Juni 2022.
- Al-Farisi Muhammad Salman, “Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21 No. 1, Januari- April 2021.
- Almaida Zennia, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non-tunai”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Anasya Zulkarnain Cut Sabina & Maret Priyanta, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca



- Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Bina Hukum lingkungan*, Vol. 5, No. 3, 2022.
- Angela Sihotang Githa, Pujiyono, Sa’adah Nabitatus, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2017.
- Anggraen Ricca & Sari Indah Mutiara, “Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020.
- Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
- Ansari Muhammad Insa, “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Ansori Mhd., “Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.
- Apendi Sofyan, “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni, 2021.
- Arfan faiz, “Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1 Januari-April, 2012.
- Arinanda Zsazsa Dordia & Aminah, “Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1, Februari 2021.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 55. Dikutip dari Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021.
- Azhar, “Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”, *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Baihaki M.Reza, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litishak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Baskara Bayu Yosa, “Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Skpd Kota Dumai)”, *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
- Benuf Kornelius, Aritonang Abram Robert, Simanjuntak Supriardoyo, “Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, Januari 2021.
- Bilal Muhamad, Fauzi Azhar Nur & Santoso Imam Budi, “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2021.



Budi Mulianto dan Rijalul Fikri, “Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, *Jurnal Wedana*, Volume 4, Nomor 1, April 2018.

- Budiyono, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Januari-April, 2013.
- Cahyono Eko, Sulistyanto & Sarah Azzahwa, “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2..
- Campbell Henry, “Black’s Law Dictionary”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, Issue 3, September 2020.
- Darongke Friskilia, Rumimpunu Dientje & Roeroe Sarah, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, vol. 10, No. 3, 2022.
- Darwance, Salfutra Reko Dwi dan Yokotani, “Pembukaan Lahan Perkebunan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian (Studi Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Lada Di Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan)”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2, Desember 2018.
- Dewi Dahlia Kusuma, Syahrin Alvi, Arifin Syamsul & Tarigan Pendastaren, “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.1, Januari 2014.
- Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 11, No. 2, November 2020.
- E. Saija Vica J., “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juli, 2014.
- Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7, Nomor 2, September 2021.
- Faiz Arfan, “Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2012.
- Faizal Liky, “Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Farhani Athari Dan Chandranegara Ibnu Sina, *Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Fathoni & S. Tisnanta, “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Fatimah Siti, “Pancasila Sebagai Batu Uji Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 05 Mei, 2018.
- Febriyanti Dwi, Aini Sartika Nur, Resti Alya Vena, Bagaskara Raka, “Fungsi Amdal Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah



- Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Firdaus, “Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Fitria Andalus Handayan dan Mohamad Ichsana Nur, Implementasi *Good Governance* di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2019.
- Frastien Dede, “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 2 Number 2, Oktober 2017.
- Fudika Moza Dela, Chaidi Ellydar & Syukur Saifuddin, “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022.
- Gandara Moh, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, November 2020.
- Ginting Eriko Fahri, Wicaksono Dian Agung, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020.
- Grace Sharon, “Teori Wewenang Dalam Perizinan”, *Jurnal Justicia Belen*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Hakim Dani Amran, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2, April-Juni 2015.
- Handoyo Budi, “Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif”, *Jurnal At-Tasyri*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Hayati Muslimah & Sulastri, “Kewenangan Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Wasaka*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022.
- Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011.
- Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Issue 3, September 2020.
- Herlina Nina & Supriyatin Ukilah, Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 9, No. 2, September 2021.
- Herman & Muin Firman, “Sistematikasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2018.
- Hoesein Zainal Arifin, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012.
- Imran Suwitno Y., “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013
- Inayah Rts. Fanny, Budhiartie Arrie, Mushawirya Rustian, “Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi”, *Jurnal Of Administration Law*, Vol. 3 No. 2, Juni 2022.

- Iza Rumesten RS, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Jati Wasisto Raharjo, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.
- Kohilay Puan Yulistiana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua & Andress Deny Bakarbesy, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 1, 2022.
- Kurniawaty Yuniar, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, Maret 2016.
- Kusdarini Eny, "Arti Penting Dan Impelementasi Hukum Perizinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2005.
- Lala Ongki Andika, Kaawoan Johannis & Sumampow Ismail, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Memanfaatkan sumber Daya Alam Di Bidang Perikanan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kumakecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2020.
- Lathif Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Layuck Kezia M., "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2020.
- Ledyawati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Agregasi*, Vol. 5, No. 1, Mei 2017.
- Lestari Sulistyani Eka & Djanggih Hardianto, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, April 2019.
- Luhukay Roni Sulistyanto, "Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- M. K. Panambunan Amelia, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2, Februari 2016.
- Magnar Kuntana, Junaenah Inna, dan Taufik Giri Ahmad, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Mahardika Ahmad Gelora, "Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.
- Mandey Rommy Fernando, "Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 4, Juni 2015.
- Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.



- Marpaung Anna, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7 No. 1, Januari 2012.
- Maulana Rifqy & Jamhir Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Mintasrihardi, Reinelda Baiq & Elisyah, “Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 1, Maret 2018.
- Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2, Nomor 3, November 2020.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, “Beberapa Kesalahan Konseptual Pada Uu Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2021.
- Muhammad Agus, “Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum *Progresif*”, *Jurnal MMH*, Vol. 41, No. 4, Oktober 2012.
- Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015.
- Mulianto Budi dan Fikri Rijalul, “Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, *Jurnal Wedana*, Vol. 4, No. 1, April 2018.
- Mulyani Basri, “Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Juridical*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Mumpuni Niken Wahyuning Retno, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan *Sustainable Development*”, *Amnesti: Jurnal Hukum* 75 Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.
- Nasir Cholidin, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.
- Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Nurkin Baharuddin, “Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Perennial*, Vol. 2, No. 1, 2006.
- Nurmayani & Mery Farida, “Problematisasi Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja (The Problems of the Discretionary Concept in the Implementation of Government Administration after the Job Creation Law)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2021.
- Nurtama Iqra Elma, “Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga”, *Jurnal Notaire*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Pancapuri Azisia, Safa’at Rachmad & Istislam, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang)”, *Jurnal Magister Ilmu Kenotariatan*, September 2016.
- Primadi Sandra, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Izin Usaha Perkebunan





- Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Priyono Bayi, “Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Qodriyatun Sri Nurhayati, “Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja”, *Spirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Rahmadhony Aditya, Setiawan Iwan & Ekoriano Mario, “Problematisa *Delegated Legislation* pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 4, Desember, 2020.
- Rahmi Elita, “Instrumen Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Sawit dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Redi Ahmad, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3 Desember 2016.
- Ridwan, “Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, Desember 2021.
- Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Volume 8 Nomor 1, Februari 2021.
- Risal Samuel, Bajar Abner Herry & Hergianasari Putri, “Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak”, *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Roihanah Rif’ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- RS Iza Rumesten, “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014.
- Sabda Sarah Bunda Medellu dan Stephanie Elisandra Lorin Ledo, “Analisis Perubahan Pengaturan Amdaldalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 6, Nomor 1, 2021.
- Saleh M., Kafrawi, Khair Abdul & Sarkawi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam pengaturan Pertambangan Rakyat”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 3, November 2020.
- Saputra Rahmat & Dhianty Rama, “Pemahaman UU Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap *Sustainable Development* Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi”, *ABDI BHARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Satriawan Desman Diri, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember Tahun 2021.
- Sedubun Victor Juzuf, “Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015.



- Simamora Janpatar & Sarjono Andrie Gusti Ari, “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.
- Sirait Janri Wolden Halomoan, “Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, Nomor 2, Januari 2017.
- Sofyan Apendi, “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Sopiani & Mubaroq Zainal, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Sopiani & Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.
- Sri Nur Hari Susanto, “*Good Governance* Dalam Konteks Hukum Administrasi, Administrative Law & Governance Journal”, Volume 2, Issue 2, June 2019.
- Subadi, dan Tiara Oliviarizky Toersina, "Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 30, Nomor 1, 2018.
- Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Sudarwanto AL Sentot dan Kharisma Dona Budi, “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechstvinding*, Vol. 9, No. 1, April 2020.
- Sugiarto Agus, “Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Suhartono Slamet, “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, Februari 2013.
- Suhayati Monika, “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.
- Suilstiowati, “Penerapan Prinsip Lisensi Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.
- Sukardi dan Widiati E. Prajwalita, “Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Yuridika* Vol. 25 No. 2, 2010.
- Suryani Dini, Izzati Fathimah Fildzah, Syafi’i Imam, Adaba Pandu Yuhsina & Satriani Septi, “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 18, No. 2, Desember 2021.
- Susanto Sri Nur Hari, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 3, September 2020.



- Tendean Christovel Rezky Janes, “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7, No. 9, November 2018.
- Tresya Dewi, Mayasari Ima, Suhendra Abdul Aziz, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Triady Bachruddin Devi & Dewi Saraswati, “Pengelolaan Tambang Batubara Di Kalimantan Timur: Tinjauan Kebijakan Publik”, *Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Triningsih Anna, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
- Ubaiyana & Viri Kristina, “Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 19, No. 1, Mei 2022.
- Wandayati Dida Rachma & Sirega Nur Rahmadayana, “Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang”, *Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Waris Irwan, “Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan *Good Governance*”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.
- Winarni Fajar, “Problematisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 3, Juni 2022.
- Winda Fitri & Luthfia Hidayah, “Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021.
- Yakin Sumadi Kamarol, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017.
- Yonnawati, “Rekonstruksi Hukum Penataan Ruang Berkaitan Dengan Pemekaran Daerah Otonomi Baru”, *Jurnal Justicia Sains*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Yusri Munaf, “Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris)”, *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1 Maret 2018.
- Yusyanti Diana, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016.
- Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal legislasi Indonesia*”, Volume 9, Nomor 1, April 2022.
- Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, April 2022.
- Zainuri, “Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 28, Januari 2019.
- Zarkasi, “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Zuhri M., “Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, Th. XIV, Desember 2012.

Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

### Laporan Penelitian

- Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Tahun 2015.
- Almas Sjafrina, J. Danang Widoyoko dan Lais Abid, *Menguras Bumi, Merebut Kursi, Policy Paper*, Indonesia Corruption Watch, Tahun 2013.
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, *Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wlayah Dan Pengelolaan SDA Di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang*, Bandung: FH Unpad, Tahun 2000.
- \_\_\_\_\_, *Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, *Makalah ini tidak dipublikasikan*, Jakarta: 1995.
- Galuh Wahyu Kumalasari, “Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”, *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016.
- Hania Rahma, *Sumber Daya Alam curse dan Tata Kelola*, *Laporan Penelitian (Hasil Diskusi Publik)*, Auriga, ACLC KPK & Universitas Mulawarman, 2020.
- Novianti Lestari & Tundjung Herning Sitabuana, *Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Prosiding Serina*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2022.
- La Ode Bariun & Hijriani, *Masa depan otonomi daerah terhadap keberlakuan undang-undang cipta kerja (desentralisasi atau sentralisasi)*, *Laporan penelitian* pada kerjasama antara Mahkamah Konstitusi bidang Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bersama dengan dan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) Tahun 2021.
- Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, *Laporan Penelitian*, STIA LAN, Jakarta, 2000.
- Tim Peneliti STPN, *Membaca Ulang Politik Dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN)*, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013.
- Tim Penyusun, “Kajian Hukum Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan”, *Laporan Penelitian*, Konsorsium LBH Palembang Lingkar Hijau Solidaritas Perempuan Palembang, Tahun 2018.
- Tim Penyusun, “Kendali Bencana Di Ruang Kota: Studi Tentang Peran Audit Tata Ruang Dalam Penegakan Hukum Tata Ruang Di Kawasan Perkotaan”, *Laporan Penelitian Internal Dosen*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Tahun 2021.
- Tim Penyusun, “Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataukah Desentralisasi)”, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Tahun 2021.





- Tim Penyusun, “Membangunkan Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi”, *Laporan Penelitian*, Wahana Lingkungan Indonesia, Tahun 2021.
- Tim Penyusun, “Undang-Undang Cipta Kerja dan Sawit Berkelanjutan Sebuah Opini Legal”, *Laporan Penelitian* bersama HICON, KEHATI dan Spos Indonesia, Tahun 2021.
- Tim Penyusun, Analisis UU Cipta Kerja Sector Kelautan Dan Perikanan, *Laporan Penelitian*, Indonesia Ocean Justice Initiative, Tahun 2020.
- Tim Penyusun, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2020.
- Tim Penyusun, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tata Kelola Perkebunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI Tahun 2020, Tahun 2020.
- Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2020.
- Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancang-Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun 2020.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik tentang Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR Dalam Sistem Indonesia*, Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
- Tim Penyusun, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Cetakan Pertama, Jakarta: BAWASLU, 2019.
- Tim Penyusun, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

### Website

- Ady Thea DA, Prospek dan Tantangan Perkebunan Sawit Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prospek-dan-tantangan-perkebunan-sawit-pasca-berlakunya-uu-cipta-kerja-lt5ff40be46d47f/?page=all> (diakses 15 Oktober 2022).